PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN REKAN KERJA DALAM SATU PERUSAHAAN
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 (STUDI DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG)
WIBISONO AJI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN REKAN KERJA DALAM SATU PERUSAHAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 (STUDI DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG)

Oleh:
Wibisono Aji[1], Ari Hernawan[2]

INTISARI

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja di Perum BULOG yang melakukan Perkawinan dengan rekan kerja lain dalam satu perusahaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen atas berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara terhadap responden dan narasumber mempergunakan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja di Perum BULOG pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 telah memberikan kepastian bagi pekerja di Perum BULOG yang memiliki ikatan perkawinan sesama rekan kerja karena manajemen dan serikat pekerja Perum BULOG berkomitmen untuk membolehkan adanya perkawinan sesama pekerja yang kemudian dituangkan kedalam perjanjian kerja bersama dengan syarat dan ketentuan yaitu penugasan atau penempatan tidak boleh dalam satu unit kerja, penugasan terhadap jabatan hanya dapat ditugaskan kepada salah satu yaitu suami atau istri, apabila terjadi perkawinan sesama pejabat maka salah satu diantaranya yaitu suami atau istri harus di alih tugaskan sebagai staf dan apabila suami atau istri menduduki jabatan dengan level tinggi maka tidak diperkenankan bertugas di lokasi dan lingkup kerja yang sama.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Perkawinan, Perusahaan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

[1] Mahasiswa MIH Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

[2] Dosen MIH Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN REKAN KERJA DALAM SATU PERUSAHAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 (STUDI DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG)
WIBISONO AJI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LEGAL PROTECTION FOR THE WORKERS WHO HAS MARRIED WITH CO-WORKERS IN THE SAME COMPANY AFTER DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 13/PUU-XV/2017 (STUDY IN PUBLIC COMPANY (PERUM) BULOG)

By:
Wibisono Aji[1], Ari Hernawan[2]

ABSTRACT

The purpose of this research is to ascertain and analyze legal protection for workers at Perum BULOG who are married to other co-workers in the same company after the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XV/2017.

This research is empirical normative research that is descriptive-analytical. Normative research is conducted through library research utilizing document studies on various primary and secondary legal materials. Empirical research is conducted through field research by interviewing respondents and resource persons using a tool in the form of interview guidelines. The data results of library research and field research are analyzed qualitatively.

The results of the study conclude that legal protection for workers at Perum BULOG after the Decision of the Constitutional Court Number 13/PUU-XV/2017 has provided certainty for its workers because the management and unions of Perum BULOG are committed to allowing the existence of a marriage of fellow workers which is then poured into a Collective Labor Agreement with the terms and conditions, namely the assignment or placement may not be in one work unit, the assignment to a position can only be assigned to one of the husbands or wives, if there is a marriage of fellow officials, one of them is husband or wife must be assigned as staff, if husband or wife occupies a high-level position, they are not allowed to work in the same location and scope of work.

Key Words: Legal Protection, Worker, Marriage, Company, Constitutional Court Decision

---

[1] *Student of MIH Jakarta Campus, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.*

[2] *Lecturer of MIH Jakarta Campus, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.*